

# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

## LAPORAN KEUANGAN

Semester I

Periode Tahun 2023

Kode Satker 401909

A decorative graphic consisting of several overlapping, semi-transparent green polygons with white outlines, creating a complex, crystalline shape that frames the contact information.

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Kelurahan Mulia Agung  
Kec. Banyuasin III  
Banyuasin - Sumatera Selatan  
Telp/Fax. (0711) 5723669  
e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN  
PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BALAI**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III  
Banyuasin - Sumatera Selatan**

**Telp/Fax. (0711) 5723669**

**e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat No. S-21/PB/PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana und tuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 27 Juli 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
**ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.**  
NIP.19761203 201101 1 005

# DAFTAR ISI

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	5
II. Neraca .....	7
III. Laporan Operasional .....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	12
A. Penjelasan Umum .....	12
A.1. Dasar Hukum .....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai .....	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
A.4. Basis Akuntansi .....	15
A.5. Dasar Pengukuran .....	15
A.6. Kebijakan Akuntansi .....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	23
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	23
B.2. Belanja .....	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	25
C.1. Aset Lancar .....	25
C.2. Aset Tetap .....	26
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	27
C.6. Ekuitas .....	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	28
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	28
D.2. Beban Pegawai .....	28
D.3. Beban Persediaan .....	28

D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	28
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	29
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	29
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	29
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	29
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	30
D.11.	Beban Lain-lain .....	30
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	30
D.13.	Pos Luar Biasa .....	30
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	30
E.1.	Ekuitas Awal .....	30
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	31
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	31
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	31
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	31
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	31
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	31
E.3. 6	Ekuitas Akhir .....	32
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	32
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	32
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	32

## DAFTAR TABEL



## Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 2022	2
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2023	23
Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2023 dan 2023	23
Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023	24
Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023	24

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III  
Banyuasin - Sumatera Selatan  
Telp/fax : (0711)-5723669  
e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 27 Juli 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.  
NIP.19761203 201101 1 005

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp10.901.932.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi untuk semester I sebesar Rp2.921.719.487,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Aset Semester I Tahun 2023 per 30 Juni 2023 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp36.173.650,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), kewajiban sebesar Rp398.367.396,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Ekuitas sebesar Rp31.375.862.990,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2023	2022	Rp	%
<b>Aset Lancar</b>				
Kas di bendahara pengeluaran	35.400.000	0	35.400.000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	773.650	0	773.650	0.00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>36.173.650</b>	<b>0</b>	<b>36.173.650</b>	<b>0.00</b>
<b>Kewajiban</b>				
Utang Pada Pihak Ketiga	240.082.830	1.784.638	238.298.192	13.352.75
Uang Yang Belum Ditagihkan	122.110.916	0	122.110.916	0,00
Uang Muka dari KPPN	35.400.00	0	35.400.00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	773.650	0	773.650	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>398.367.396</b>	<b>1.784.638</b>	<b>396.582.758</b>	<b>22.222.03</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>31.375.862.990</b>	<b>31.782.520.620</b>	<b>(406.657.640)</b>	<b>1.28</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>31.774.230.386</b>	<b>31.784.305.268</b>	<b>(10.074.882)</b>	<b>0.03</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Semester I Tahun 2023 untuk periode 2023, pendapatan Operasional sebesar Rp621.621,- (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) Beban Operasional Rp3.345.745.877,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp(3.345.124.256),- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 Juni 2023 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp31.782.520.630,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(3.345.124.256),- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan Ekuitas akhir sebesar Rp31.375.862.990,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*



# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	PER 30 JUNI 2023		
			Anggaran	Realisasi	%
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>			
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	621.621	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.699.983.000	1.930.115.667	52
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.413.335.000	842.438.443	60
3.	Belanja Modal	B.2.3.	5.788.614.000	149.165.377	3
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>10.901.932.000</b>	<b>2.921.719.487</b>	<b>27</b>

## II. Neraca

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2023
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	C.1	
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	35.400.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0
Persediaan	C.1. 3.	773.650
Jumlah Aset Lancar		36.173.650
Aset Tetap	C.2	
Tanah	C.2. 1.	2.819.580.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.610.231.310
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	310.781.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	190.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	27.020.108.581
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.022.834.155)
Jumlah Aset Tetap		31.738.056.736
Jumlah Aset		31.774.230.386
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	240.082.830
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	35.400.000
Uang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 3.	122.110.916
Uang Jangka Pendek Lainnya	C.5. 4.	773.650
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		398.367.396
Jumlah Kewajiban		398.367.396
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	C.6	31.375.862.990
Jumlah Ekuitas Dana		31.375.862.990
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		31.774.230.386

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2023 DAN 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2023	2022
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	621.621	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>621.621</b>	<b>0</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	2.141.697.509	2.053.843.050
Beban Persediaan	D. 3	17.051.200	17.334.250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	523.914.759	514.171.016
Beban Pemeliharaan	D. 5	305.968.834	54.718.082
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	19.200.000	30.243.043
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	337.893.575	235.022.138
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>3.345.745.877</b>	<b>2.905.331.579</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(3.345.124.256)</b>	<b>(2.905.331.579)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>157</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>			
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
<b>Surplus (Defisit) LO</b>		<b>(3.345.124.256)</b>	<b>(2.905.331.422)</b>

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2023 DAN 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	31.782.520.630	27.156.365.131	4.626.155.499	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.345.124.256)	(2.905.331.422)	(439.792.834)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	-
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	-
Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2.938.466.616	2.251.609.325	(686.857.291)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(406.657.640)	(653.722.097)	(247.064.457)	-
EKUITAS AKHIR	31.375.862.990	26.502.643.034	(4.873.219.956)	-

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK/.05/2016.
- q. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktora Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.



Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*
2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

- nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..



**(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp621.621

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp621.621 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 621.621. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	621.621	621.621	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 2022  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 Juni 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	621.621	157	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B.2. Belanja

Realisasi Belanja  
Negara : Rp  
2.921.719.487

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.921.719.748,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan anggaran senilai Rp10.901.932.000,-(sepuluh milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2023 dapat

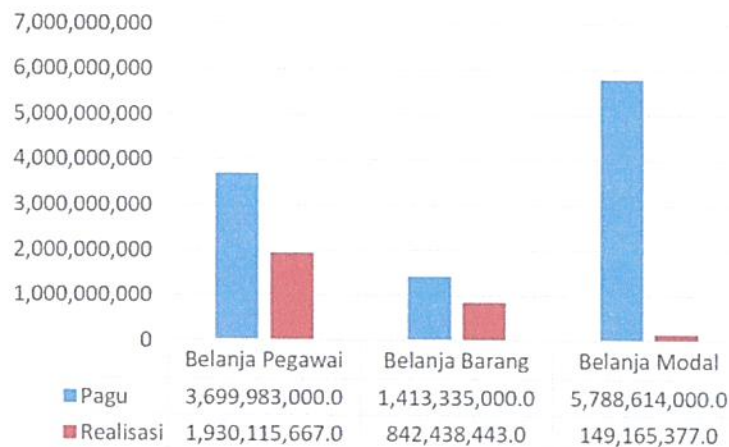
dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.699.983.000	1.930.115.667	52
Belanja Barang	1.413.335.000	842.438.443	60
Belanja Modal	5.788.614.000	149.165.377	3
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>10.901.932.000</b>	<b>2.921.712.487</b>	<b>27</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Desember 2022

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp2.921.719.487,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), atau sebesar 27% dari anggaran senilai Rp10.901.932.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja  
Pegawai :  
Rp1.930.115.667

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2023 Rp1.930.115.667,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dari anggaran awal sebesar Rp3.699.983.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

### B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja  
Barang :  
Rp842.438.443*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2023 sebesar Rp842.438.443,- (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dari anggaran sebesar Rp1.413.335.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja  
Modal :  
Rp149.165.377*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp149.165.377,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari anggaran sebesar Rp5.788.614,-(lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat belas rupiah)

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:  
Rp36.173.650*

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2023 sebesar Rp36.173.650,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp35.400.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

#### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar  
di Muka: Rp 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2023 sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp 773.650* Persediaan periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp773.650. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp 31.738.056.736* Nilai Aset Tetap periode 30 Juni 2023 tersaji sebesar Rp31.738.056.736,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp2.819.580.000* Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.819.580.000,-(dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 3.610.231.310* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 Juni 2023 sebesar Rp3.610.231.310,-(tiga milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah)

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp 310.781.000* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2023 sebesar Rp310.781.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya : Rp 190.000* Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 Juni 2023 sebesar Rp190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

#### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
27.020.108.581*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 Juni 2023 sebesar Rp27.020.108.581,- (dua puluh tujuh milyar dua puluh juta seratus delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)

#### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap :  
Rp(2.022.834.155)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 Juni 2023 sebesar Rp(2.022.834.155),-(dua milyar dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah)

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka  
Pendek :  
Rp398.367.396*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 Juni 2023 sebesar 398.367.396,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)

#### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka  
dari KPPN:  
Rp35.400.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.6. Ekuitas

*Ekuitas:  
Rp  
31.375.862.990*

Ekuitas periode 30 Juni 2023 sebesar 31.375.862.990,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNPB : Rp621.621* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp621.621.- (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai : Rp 2.141.697.509* Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp2.141.697.509,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) dan Rp2.053.843.050,-(dua milyar lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah). Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp 17.051.200* Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.051.200,- (tujuh belas juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Rp17.334.250,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp523.914.759* Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp523.914.759,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat belas tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Rp514.171.016,-(lima ratus empat belas juta seratus tujuh puluh satu ribu enam belas rupiah). Beban Jasa

adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp305.968.834*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp305.968.834,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Rp54.718.082,-(delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan puluh dua rupiah). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### **D.6. Beban Perjalanan Dinas**

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp19.220.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.220.000,- (sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.243.043,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

#### **D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### **D.8. Beban Bantuan Sosial**

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

#### **D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : Rp  
337.893.575*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp337.893.575,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Rp235.022.138,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama



masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

#### **D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih**

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### **D.11. Beban Lain-lain**

*Beban Lain-  
Lain : Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

#### **D.12. Kegiatan Non Operasional**

*Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non oprasional untuk periode 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0. dan Rp157 (seratus lima puluh tujuh rupiah)

#### **D.13. Pos Luar Biasa**

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

### **E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

#### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp31.782.520.630,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

## **E.2.Surplus (defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(3.345.124.256),- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan Rp(2.905.331.422),- (dua milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### **E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### **E.3.5 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.375.862.990,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Rp26.502.643.034,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah).

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan ini.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

1. Revisi ke-4 tertanggal 25 Juli 2023;

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

-Nihil-



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005  
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01  
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 401909

Tgl Data : 29/07/23 6:00 PM  
Tgl Cetak : 29/07/23 9:28 PM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	10,901,932,000	2,921,719,487	7,980,212,513	27	4,986,169,000	2,251,609,482	2,734,559,518	23
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalan Balai, 29 Juli 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom  
197612032011011005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2023  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : ( 401909 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 29/07/23 6:00 PM  
Tgl Cetak : 29/07/23 9:27 PM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	31,782,520,630	27,156,365,131	4,626,155,499	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,345,124,256)	(2,905,331,422)	(439,792,834)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,938,466,616	2,251,609,325	686,857,291	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(406,657,640)	(653,722,097)	247,064,457	-
EKUITAS AKHIR	31,375,862,990	26,502,643,034	4,873,219,956	-

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



Pangkalan Balai, 29 Juli 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom  
197612032011011005

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 401909 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 29/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 29/07/23 9:27 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	621,621	0	621,621	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	621,621	0	621,621	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	621,621	0	621,621	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,141,697,509	2,053,843,050	87,854,459	4.278
Beban Persediaan	17,051,200	17,334,250	(283,050)	(1.633)
Beban Barang dan Jasa	523,914,759	514,171,016	9,743,743	1.895
Beban Pemeliharaan	305,968,834	54,718,082	251,250,752	459.173
Beban Perjalanan Dinas	19,220,000	30,243,043	(11,023,043)	(36.448)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	



## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 401909 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 29/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 29/07/23 9:27 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	337,893,575	235,022,138	102,871,437	43.771
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>3,345,745,877</b>	<b>2,905,331,579</b>	<b>440,414,298</b>	<b>15.159</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(3,345,124,256)</b>	<b>(2,905,331,579)</b>	<b>(439,792,677)</b>	<b>15.137</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	157	(157)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	157	(157)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>(157)</b>	<b>(100)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(3,345,124,256)</b>	<b>(2,905,331,422)</b>	<b>(439,792,834)</b>	<b>15.137</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(3,345,124,256)</b>	<b>(2,905,331,422)</b>	<b>(439,792,834)</b>	<b>15.137</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



Pangkalanbala, 29 Juli 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom  
197612032011011005

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 30 JUNI 2023  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : ( 401909 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 29/07/23 6:00 PM  
 Tgl Cetak : 29/07/23 9:28 PM  
 Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,400,000	0	35,400,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	773,650	0	773,650	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>36,173,650</b>	<b>0</b>	<b>36,173,650</b>	
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	2,819,580,000	2,819,580,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,610,231,310	3,587,381,310	22,850,000	0.64
Gedung dan Bangunan	310,781,000	310,781,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27,020,108,581	26,748,832,288	271,276,293	1.01
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,022,834,155)	(1,682,459,330)	(340,374,825)	20.23
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>31,738,056,736</b>	<b>31,784,305,268</b>	<b>(46,248,532)</b>	<b>(0.15)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>31,774,230,386</b>	<b>31,784,305,268</b>	<b>(10,074,882)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	240,082,830	1,784,638	238,298,192	13,352.75
Utang Yang Belum Ditagihkan	122,110,916	0	122,110,916	0.00
Uang Muka dari KPPN	35,400,000	0	35,400,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	773,650	0	773,650	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>398,367,396</b>	<b>1,784,638</b>	<b>396,582,758</b>	<b>22,222.03</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>398,367,396</b>	<b>1,784,638</b>	<b>396,582,758</b>	<b>22,222.03</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	31,375,862,990	31,782,520,630	(406,657,640)	(1.28)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>31,375,862,990</b>	<b>31,782,520,630</b>	<b>(406,657,640)</b>	<b>(1.28)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>31,375,862,990</b>	<b>31,782,520,630</b>	<b>(406,657,640)</b>	<b>(1.28)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>31,774,230,386</b>	<b>31,784,305,268</b>	<b>(10,074,882)</b>	<b>(0.03)</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalan Balai, 29 Juli 2023  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 Sekretaris  
  
 ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom  
 197612032011011005



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401909/2023**



DS:5850-5403-1118-3228

**Revisi ke 05**

Tanggal : 25 Juli 2023

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sebesar : Rp. 10.901.932.000 ( SEPULUH MILIAR SEMBILAN RATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	10.901.932.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 10.901.932.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2023**



DS:5850-5403-1118-3228

Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	10.901.932.000
WA.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.113.318.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	5.788.614.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5850-5403-1118-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I A. 1

Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			10.901.932.000
Kegiatan	:	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5.113.318.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.113.318.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Laporan	4.446.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	5.108.872.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			5.788.614.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	5.788.614.000
Rincian Output	:	01 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1,00	m2	5.788.614.000

Jakarta, 30 November 2022  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2023**



DS 5850-6403-1118-3228

**I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	10.901.932.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	10.901.932.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
							Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS 5850-5403-1118-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Salkes : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

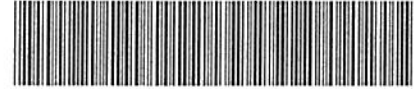
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3.699.983	1.413.335	5.788.614	-	-	10.901.932		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.699.983	1.413.335	5.788.614	-	-	10.901.932		
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.699.983	1.413.335	-	-	-	5.113.318		
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	3.699.983	1.413.335	-	-	-	5.113.318	11.09	
01 RM		3.699.983	1.413.335	-	-	-	5.113.318	160	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	5.788.614	-	-	5.788.614		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	-	5.788.614	-	-	5.788.614	11.09	
01 RM		-	-	5.788.614	-	-	5.788.614	160	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.699.983</b>	<b>1.413.335</b>	<b>5.788.614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.901.932</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS 5850-5403-1118-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	401909	<b>PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	269.450	700.819	518.240	610.828	359.101	592.556	863.631	352.496	327.833	331.833	367.292	5.587.853	10.901.932
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	269.920	269.920	269.920	500.355	269.920	500.355	269.920	269.920	269.920	269.920	269.920	269.993	3.699.983
		<b>BELANJA BARANG</b>	19.530	423.543	127.345	106.873	88.501	76.647	83.711	60.430	57.913	61.913	97.372	209.557	1.413.335
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	7.357	120.974	3.600	680	15.554	510.000	22.146	0	0	0	5.108.303	5.788.614
	005.01.WA.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	289.450	693.463	397.265	607.228	358.421	577.002	353.631	330.350	327.833	331.833	367.292	479.550	5.113.318
		51 BELANJA PEGAWAI	269.920	269.920	269.920	500.355	269.920	500.355	269.920	269.920	269.920	269.920	269.920	269.993	3.699.983
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	19.530	423.543	127.345	106.873	88.501	76.647	83.711	60.430	57.913	61.913	97.372	209.557	1.413.335
	005.01.WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	7.357	120.974	3.600	680	15.554	510.000	22.146	0	0	0	5.108.303	5.788.614
		53 BELANJA MODAL	0	7.357	120.974	3.600	680	15.554	510.000	22.146	0	0	0	5.108.303	5.788.614

Jakarta, 30 November 2022  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2023  
IV A. B L O K I R**



DS 5850-5403-1118-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS 5850-5403-1118-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 10,901,932,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			10,901,932,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5,113,318,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,113,318,000	
-----					
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Laporan		4,446,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			4,446,000	
C	Inventaris Perkantoran CPNS			4,446,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu )			4,446,000	RM
	- Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) [2 ORG x 1 THN]	2.0 OT	2,223,000	4,446,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,108,872,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu )			1,454,678,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu )			38,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	34,341	34,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu )			100,174,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu )			28,683,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu )			28,944,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 10,901,932,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			1,259,218,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,408,889,000</b>	
<b>A</b>	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>464,252,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			436,922,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
	- KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	1.0 THN	75,665,804	75,665,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu )			27,330,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran ( pegawai 30 orang)	30.0 OB	911,000	27,330,000	
<b>B</b>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>222,630,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			189,000,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG]	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 10,901,932,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.160-Sekayu )			12,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.160-Sekayu )			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu )			4,000,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
C	Pemeliharaan Kantor			457,135,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu )			262,077,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	104,999	262,077,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu )			195,058,000	RM
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	16,500,000	16,500,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	23,987,000	23,987,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	27,500,000	82,500,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			100,132,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu )			28,216,000	RM
	- Seragam Dinas CPNS [2 CPNS x 2 STEL]	4.0 STEL	804,000	3,216,000	
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 10,901,932,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu )			71,916,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,547,000	18,564,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBPN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	880,000	10,560,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,596,000	19,152,000	
E	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc			105,840,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu )			105,840,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	1,260,000	105,840,000	
H	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding			50,890,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu )			50,890,000	RM
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	358	10,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	432,250	34,580,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	200,000	8,000,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
I	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL			8,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu )			8,000,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	
J	Penanganan Pandemi COVID-19			10,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.160-Sekayu )			10,000	RM
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	10,000	10,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			5,788,614,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1.0 Unit, m2, Paket		5,788,614,000	
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 m2		5,788,614,000	
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			5,788,614,000	
A	Lanjutan Sarling Kantor			5,788,614,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu )			5,788,614,000	RM
	- Fisik	1.0 Keg	5,010,614,000	5,010,614,000	
	- Perencana	1.0 Keg	101,000,000	101,000,000	
	- Pengawas	1.0 Keg	510,000,000	510,000,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 Keg	167,000,000	167,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 26 Juli 2023  
 Sekretaris  
  
**ANDRIANTO FACHRIZAL S. Kom**  
 NIP. 197612032011011005

## KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

### Tingkat Satker (Non BLU)

Periode : Semester I, T.A 2023

Kode Satker : 401909  
 Nama Satker : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai  
 Nama Eselon 1 : Badan Urusan Administrasi  
 Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan.</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. LRA face per 31 Desember 2015			Ada
2. Neraca per 31 Desember 2015			Ada
3. Laporan Operasional per 31 Desember 2015			Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015			Ada
5. Catatan atas laporan Keuangan			Ada
<b>Lampiran Pendukung Laporan Keuangan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi			Ada
2. Laporan Kuasa Pengguna barang			Ada
3. Daftar Rekening Pemerintah			Ada
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA			Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Persamaan dasar akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca			Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas			Sama
<b>KESESUAIAN MIGRASI SALDO AWAL</b>			
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Saldo Awal Aset 2015 = Total Aset Audited 2014			Sama
2. Saldo Awal Kewajiban 2015 = Total Kewajiban Audited 2014 - Pendapatan Ditangguhkan + Akun 219671			Sama
3. Saldo Awal Ekuitas 2015 = Total Ekuitas Dana Audited 2014 + Pendapatan Ditangguhkan - Akun 219671			Sama
<b>NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>Pengecekan Saldo Tidak Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak



<b>Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) <i>(kec.Penyisihan dan Akumulasi)</i>			Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)			Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) <i>(kec.Pengembalian Pendapatan)</i>			Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)			Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) <i>(kecuali Beban Penyisihan Piutang)</i>			Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)			Ya
<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>			Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)			Tidak
8. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)			Tidak
9. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)			Tidak
4. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
5. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
6. Adakah akun 525xxx (Belanja barang BLU)			Tidak
7. Adakah akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
8. Adakah akun "yang belum diregister"			Tidak
9. Adakah akun-akun lainnya yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.			Tidak
<b>Hibah Langsung</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun			
1. 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan), dengan nilai maksimal sama, bisa lebih kecil.			Ya
2. akun 218211 di kredit			Ya
<b>Pengecekan akun tertentu</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Akun 391119 (Koreksi Lainnya)			Tidak
<i>Jika ada, uraikan dalam lampiran, Jurnal SAIBA yang dibuat dan penyebabnya.</i>			
2. Adakah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset lainnya)			Ada/tidak
<i>Akun ini jarang terjadi, jika ada, pastikan kebenarannya dan pastikan Jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK</i>			
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
<i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif</i>			

9. Kegiatan Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan			Positif
- Beban Pegawai			Positif
- Beban Persediaan			Positif
- Beban Barang dan Jasa			Positif
- Beban Pemeliharaan			Positif
- Beban Perjalanan Dinas			Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat			Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi			Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			Pos/Neg

10. Kegiatan Non Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar			Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif

Pengecekan antar laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat/bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx/57xxx?			Ya

*Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya hanya dari pembelian Materai, atau pembelian tahun lalu, penyerahan tahun berjalan.*

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"			Ada
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Tidak

*Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK*

*Akun-akun pada LPE "terkadang" digunakan untuk pasangan jurnal yang tidak seharusnya (misal: untuk menghilangkan "belum diregister", menyamakan dengan L-BMN, dll), dengan demikian agar dilakukan penelaahan mendalam terhadap jurnal yang melibatkan akun-akun ini.*

**NERACA**

Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Sama

Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?			Tidak

Pengecekan Keterkaitan Transaksi	Ada	Tidak	Seharusnya
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			

1. Ada Akun Piutang maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang			Ada/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada/Tidak
2. Ada Piutang jangka Panjang (TP/TGR)			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
3. Ada persediaan maka akan ada akun:			Ada/Tidak
Beban Persediaan (di LO)			Ada/Tidak
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)			Ada/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL			Ada/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada/Tidak

Pengecekan Apakah sudah melakukan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka			Ada/Tidak
2. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka			Ada/Tidak
3. Ada realisasi belanja Jasa Listrik di Neraca Percobaan			Ada/Tidak

**TELAAH KESESUAIAN DENGAN LAP. BMN (APLIKASI PERSEDIAAN & SIMAK)**

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan			Sama
2. Aset Tetap			Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			Sama

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)			Sama
2. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)			Sama

*Semenjak menggunakan basis Akrua, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menaunakan menu vana sesuai atau belum.*

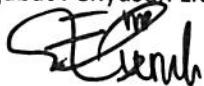
	Sesuai	Belum	Seharusnya
- Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)	N/A	N/A	
- Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)	N/A	N/A	

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrua per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)			Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)			Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)			Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)			Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)			Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)			Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB			Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"			Tidak
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>			
Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK			
	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah akun "Hibah yang belum Disahkan" telah dijelaskan?			Ya
3. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan SAP/PMK 177/2015 ?			Ya
4. Apakah semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan?			Ya
Pengungkapan Penting Lainnya			
	Ya	Tidak	Seharusnya
5. Untuk KL Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya
6. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing KL			Ya
<i>(misalnya: Status Tuntutan Hukum Pihak Ketiga (Incrakht, penganggaran), Barang Bukti, dll)</i>			

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL



(Eunike Mayerni Batubara, A.Md.A.B)  
NIP 199905222022032007



### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"*